

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gerakan perlawanan masyarakat merupakan fenomena sosial yang muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan, penindasan, atau kebijakan yang dianggap merugikan sekelompok individu atau komunitas. Fenomena ini telah terjadi di berbagai belahan dunia dan dalam berbagai konteks, mulai dari perlawanan terhadap penjajahan, kebijakan pemerintah yang otoriter, hingga gerakan sosial yang menuntut keadilan lingkungan dan hak asasi manusia.

Gerakan perlawanan masyarakat, beberapa teori dapat digunakan sebagai kerangka analisis. Salah satu teori yang relevan adalah Teori Mobilisasi Sumber Daya (Resource Mobilization Theory). Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan suatu gerakan sosial tidak hanya bergantung pada ketidakpuasan masyarakat, tetapi juga pada kemampuan mereka dalam mengorganisir sumber daya yang tersedia, seperti kepemimpinan, jaringan sosial, dan dana. Menurut McCarthy dan Zald (1977), mobilisasi sumber daya merupakan faktor kunci dalam menentukan sejauh mana sebuah gerakan sosial dapat bertahan dan mencapai tujuannya.

Selain itu, Teori Deprivasi Relatif (Relative Deprivation Theory) juga sering digunakan untuk menganalisis gerakan perlawanan. Teori ini dikemukakan oleh Ted Gurr (1970) yang menyatakan bahwa ketidakpuasan sosial muncul ketika individu atau kelompok merasa bahwa mereka mengalami ketimpangan antara harapan dan realitas yang mereka hadapi. Ketika perasaan ketidakadilan ini semakin meluas, kemungkinan besar akan muncul gerakan perlawanan sebagai bentuk ekspresi atas ketidakpuasan tersebut.

Lebih lanjut, Teori Gerakan Sosial Baru (New Social Movement Theory) yang dikembangkan oleh Alain Touraine dan Jürgen Habermas menyoroti bagaimana gerakan sosial modern tidak hanya berorientasi pada perubahan ekonomi atau politik, tetapi juga mencakup aspek identitas budaya, lingkungan, dan hak-hak individu. Gerakan ini sering kali bersifat non-hierarkis dan memanfaatkan media serta teknologi dalam menyebarluaskan pesan dan menggalang dukungan.

Melalui berbagai teori ini, penelitian mengenai gerakan perlawanan masyarakat dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat merespons kondisi sosial yang dianggap tidak adil serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan sebuah gerakan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut dinamika gerakan perlawanan masyarakat dengan pendekatan teori-teori tersebut untuk memahami pola, strategi, dan dampaknya dalam berbagai konteks sosial.

Salah satu gerakan sosial masyarakat yang didirikan untuk melawan kebijakan yang menindas oleh Kebijakan adalah JMPPK. Hal ini secara kronologi dilatar belakangi oleh kebijakan pendirian pabrik semen yang direncanakan di kawasan pegunungan kapur Kendang, yang melibatkan Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang di Jawa Tengah, memicu perlawanan dari warga Kendang. Warga yang menentang pembangunan tersebut, melalui Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), menggugat ke PTUN Semarang untuk membatalkan studi eksplorasi yang telah dilakukan dan berhasil memenangkan gugatan. Pada pertengahan tahun 2009, JMPPK mengajukan banding ke Mahkamah

Agung (MA) dan kembali memperoleh kemenangan. Sementara itu, PT Semen Indonesia telah memutuskan untuk keluar dari proyek tersebut sebelum adanya keputusan MA.

Sebagai perusahaan milik negara (BUMN), PT Semen Indonesia akhirnya memilih untuk membangun pabrik di Tuban pada tahun 2009. Pada tahun berikutnya, perusahaan ini mendirikan pabrik baru di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Proses pembangunan pabrik tersebut dimulai dengan peletakan batu pertama pada 16 Juni 2014. Namun, sebagian warga yang menolak keberadaan pabrik melakukan pemblokiran jalan yang menuju lokasi tambang, yang menyebabkan kericuhan antara ibu-ibu dengan aparat kepolisian dan TNI yang bertugas mengamankan lokasi tersebut.

Tenda perjuangan yang didirikan oleh ibu-ibu tersebut memiliki alasan kuat; mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses perizinan yang terkait dengan pembangunan pabrik dan menolak jika ruang hidup mereka terganggu. Selain itu, mereka berjuang untuk mempertahankan kelestarian pegunungan Kendang sebagai sumber mata air yang sangat vital bagi kehidupan mereka.

Sejak tenda perjuangan didirikan di jalan masuk ke tapak pabrik, gerakan penolakan terhadap pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang semakin kuat, dengan pergerakan politik yang semakin meluas. Beberapa hari setelahnya, tepatnya pada 27 Juni 2014, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengunjungi tenda perjuangan untuk melakukan mediasi antara pihak warga yang menolak pembangunan pabrik semen dan pihak perusahaan. Dalam kesempatan itu, Gubernur memberikan waktu sekitar seminggu untuk menghubungi ahli

lingkungan yang akan mendampingi warga. Meskipun demikian, meski warga kemudian mengirimkan surat kesanggupan untuk mediasi, janji mediasi yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah tidak pernah terealisasi.

Sebagai respons terhadap ketidakjelasan tersebut, ibu-ibu dari Kendang kembali melakukan aksi pada 18-20 November 2014 di Jakarta. Aksi ini diselenggarakan di beberapa institusi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Komisi Nasional Perempuan (KOMNAS Perempuan), Markas Besar Polisi Republik Indonesia (MABES POLRI), dan Mahkamah Agung (MA). Tujuan dari aksi ini adalah untuk mendesak pemerintah menghentikan seluruh proses pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia. Mereka juga menegaskan bahwa jika pembangunan terus berlanjut, mereka akan mengambil tindakan mereka sendiri untuk menghentikan proyek tersebut.

Pada 26-27 November 2014, insiden kekerasan terjadi ketika aparat keamanan menanggapi pemblokiran jalan yang dilakukan oleh ibu-ibu tersebut. Tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan menyebabkan ibu-ibu tersebut mengalami pemukulan, kekerasan verbal, dan penganiayaan yang mengakibatkan beberapa dari mereka pingsan. Warga setempat melaporkan tindakan tersebut kepada Polisi Daerah (POLDA) Jawa Tengah pada 1 Desember 2014.

Di sisi lain, sementara aksi penolakan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang terus berlangsung, perusahaan semen lain diam-diam

mengajukan izin lingkungan untuk mendirikan pabrik semen dan melakukan penambangan batu kapur di Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen, yang juga merupakan bagian dari kawasan pegunungan Kendeng Utara. Kedua kecamatan ini termasuk dalam Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Sukolilo, Kabupaten Pati, yang harus dilindungi. Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk proyek tersebut bahkan sudah dimulai pada 3 September 2014 di Hotel Pati.

Kemudian, pada 18 Desember 2014, Jaringan Masyarakat Petani Pegunungan Kendeng (JMPPK), yang dipimpin oleh Sedulur Sikep, menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Jawa Tengah. Aksi yang bertajuk “JAWA TENGAH DARURAT TAMBANG” ini dihadiri oleh warga dari berbagai daerah seperti Pati, Grobogan, Rembang, Jepara, Kudus, Semarang, Temanggung, Salatiga, Purwokerto, Sragen, Gombong, Magelang, Kebumen, Demak, Wonogiri, Pekalongan, dan Batang. Dalam aksi tersebut, sejumlah tuntutan diajukan, antara lain: menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan, menghentikan sementara tambang yang ada di Jawa Tengah, mewujudkan visi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan, serta mengecam aparat keamanan yang telah melakukan tindakan represif terhadap pejuang lingkungan.

Kontradiksi dalam pembangunan pabrik semen yang ditentang oleh petani di Pegunungan Kendeng Utara menggambarkan suatu "titik didih politik kebudayaan", yang menunjukkan peran penting pembangunan dalam memperburuk dan memperbesar perlawanan, baik dalam bentuk material maupun simbolis, seperti yang diungkapkan oleh Donald Moore dalam Perreault (2015).

Perlawanan politik petani Kendeng Utara bisa dianggap sebagai respons terhadap pernyataan sejarawan terkenal, Eric Hobsbawm (1994), yang menyatakan bahwa perubahan paling dramatis dalam abad ke-20 yang menjadi pembeda antara dunia masa lalu dan masa kini adalah "kematian petani" (dalam Rachman, 2015).

Politik perlawanan yang dilakukan oleh petani Pegunungan Kendeng Utara, dalam menanggapi pembangunan, mencerminkan adanya krisis ekologi dan agraria yang mungkin terjadi di masa depan, yang pada gilirannya menjadi kenyataan sosial yang harus dihadapi oleh seluruh umat manusia. Menurut Ardianto (2015), darurat ekologi dapat teridentifikasi, karena daerah yang akan ditambang merupakan kawasan lindung geologi yang seharusnya tidak boleh dikonversi. Sementara itu, darurat agraria tercermin dari penerapan model-model pemaksaan dalam pendirian pabrik semen.

Secara mendalam urutan kronologis Penolakan Masyarakat terhadap pembangunan Pabrik Semen di Rembang dapat disajikan sebagai berikut;

Tabel 1.1 Matriks Urutan Penolakan Pabrik Semen di Rembang

Tahun	Rangkaian Peristiwa	Keterangan
2010	Rencana pembangunan pabrik semen	PT Semen Indonesia merencanakan pembangunan pabrik di Rembang.
2014	Izin lingkungan diterbitkan	Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menerbitkan izin lingkungan untuk PT Semen Indonesia.
	Aksi penolakan oleh warga dan aktivis	Warga, terutama dari kelompok petani Kendeng, mulai melakukan aksi protes besar-besaran.
2016	Aksi cor kaki di Jakarta	Petani Kendeng menyemen kaki mereka di depan Istana Negara sebagai bentuk protes terhadap pabrik semen.

Tahun	Rangkaian Peristiwa	Keterangan
	Putusan MA membatalkan izin lingkungan	Mahkamah Agung mengabulkan gugatan warga dan membatalkan izin lingkungan pabrik semen.
2017	Gubernur Jawa Tengah menerbitkan izin baru	Ganjar Pranowo kembali menerbitkan izin lingkungan baru untuk PT Semen Indonesia.
	Aksi cor kaki jilid II	Petani Kendeng kembali melakukan aksi menyemen kaki sebagai protes atas izin baru.
	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Presiden Jokowi meminta KLHS dilakukan untuk mengevaluasi dampak lingkungan pabrik semen.
2018	Pabrik mulai beroperasi	PT Semen Indonesia tetap melanjutkan pembangunan dan mulai berproduksi meskipun ada penolakan.
2019-Sekarang	Protes berlanjut	Warga dan aktivis terus menyuarakan penolakan terhadap keberadaan pabrik.
Sumber: Olah Data Pribadi (2025)		

Kawasan karst bagian selatan Rembang, yang menjadi lokasi pembangunan dan penambangan PT. Semen Indonesia, sebenarnya merupakan daerah imbuhan air terbesar, yang dikenal dengan nama pegunungan Watuputih atau Kawasan Karst Watuputih. Fungsi kawasan ini sebagai sumber imbuhan air terbesar di Rembang membuat kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih kemudian ditetapkan sebagai CAT melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011. Dalam lampiran Keppres No 26 Tahun 2011, poin 124, CAT Watuputih diklasifikasikan sebagai CAT B, yang melintasi kabupaten Rembang dan Blora. Penetapan CAT Watuputih sebagai wilayah konservasi yang harus dilindungi tercantum dalam Pasal 25 Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber

Daya Air (Lukiarti et al., 2015).

Kematian salah satu petani Pegunungan Kendeng Utara dan aksi perlawanan yang tidak kenal lelah menciptakan sebuah gerakan yang merupakan bagian dari perjuangan Hak Asasi Manusia (HAM). Perlawanan yang dilakukan di daerah perdesaan sekitar Pegunungan Kendeng Utara, terutama di Kabupaten Rembang, yang lebih bersifat klandestin dan individualistik, sebagaimana dijelaskan oleh James Scott (1990) dan Benedict Kerkvliet (1990) di Filipina, bisa dipandang sebagai perjuangan hak (rightful resistance) dalam konteks kebebasan dari ketakutan.

Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji secara sistematis agar kita memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas gerakan perlawanan politik petani Pegunungan Kendeng Utara dalam menanggapi pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, penelitian dan kajian mendalam terkait fenomena ini serta implikasi dan kontribusinya di bidang keilmuan sangat penting untuk dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana gerakan perlawanan masyarakat di Tegaldowo dalam menolak pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini di antaranya;

1. Untuk menganalisis gerakan perlawanan masyarakat Tegaldowo melawan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Teoritis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam studi gerakan sosial khususnya khususnya gerakan masyarakat sipil melawan dominasi Negara.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak seperti pemerintah dan masyarakat dalam proses pengembangan desa.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat sumbangsih pemikiran pada institusi- institusi pemerintahan dalam aplikasi program pembangunan,

4. Bagi masyarakat

Masyarakat juga diharapkan dapat merasakan manfaat dalam proses pembangunan pabrik semen yang berada di kabupaten Rembang.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Metode	Hasil dan Pembahasan
1.	<i>Community Based Natural Resource Management: Living with Alice in Wonderland</i>	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian kualitatif yang melalui konsep manajemen alam sekitar berbasis masyarakat (<i>community base natural resource management</i>).	Keberlangsungan serta kelestarian alam agar berjalannya lebih baik jika diserahkan kepada masyarakat sekitar daripada dilaksanakan oleh pihak ketiga maupun pemerintah.
2.	Strategi Bertahan dan Strategi Adaptasi Petani Samin Terhadap Dunia Luar (Petani Samin Di Kaki Pegunungan Kendeng Di Sukolilo Kabupaten Pati)	Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan cara Meneliti tentang strategi masyarakat Samin dalam mempertahankan keseimbangan ekologis, yang berdiam di kaki Pegunungan Kendeng di daerah Sukolilo dan sekitarnya.	Dalam penelitian yang dilakukan masyarakat Samin di Sukolilo mempunyai pengetahuan lokal yang bertujuan menjaga keseimbangan ekologis di sekitar
3.	Kearifan Lokal Dalam Menjaga Lingkungan hidup (Studi Kasus Masyarakat di Desa Colo Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus)	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk Meneliti tentang kearifan lokal dalam menjaga lingkungan hidup (studi kasus masyarakat desa Colo Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus).	Hasil penelitian menjelaskan bahwa masyarakat didesa Colo menyadari akan arti pentingnya pelestarian lingkungan, khusus pelestarian tanaman pakis haji, parioto yang hanya tumbuh dikawasan lereng gunung muria.
4.	Kearifan Lokal Tentang Mitigasi Bencana Pada Masyarakat Baduy	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk Meneliti tentang kearifan lokal mitigasi bencana pada masyarakat Baduy	Hasil penelitian menjelaskan bahwa Masyarakat Baduy mempunyai tata cara sesuai dengan adat istiadat yang merupakan warisan leluhur mereka yang berkaitan dengan antisipasi terjadinya bencana alam

No.	Judul	Metode	Hasil dan Pembahasan
5.	Rekontruksi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Menuju Terlindunginya Lingkungan Hidup dan Kearifan lokal. Study Tentang Perlawanan Masyarakat Sedulur Sikep Atas Kebijakan Pembangunan Pabrik Semen Gresik Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati	Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk Menganalisis kebijakan terkait dengan pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng Utara terkait perlindungan terhadap sumber daya alam dan kearifan lokal.	Kebijakan dan aspek hukum terkait pengelolaan Pegunungan Kendeng Utara hendaknya tetap memperhatikan kelestarian alam dan perlindungan kearifan lokal masyarakat lokal.

Sumber; Olah data pribadi (2023)

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah adanya kemiripan dari segi topik pembahasan mengenai adanya gerakan masyarakat. Gerakan masyarakat ini berupa perlawanan kepada kebijakan atau aktor yang melakukan tindakan kepada keberlangsungan kehidupan masyarakat, hal itu dilakukan oleh penelitian terdahulu. Sedangkan yang menjadi titik berat dari perbedaan penelitian ini adalah terletak pada penyempurnaan waktu yang terjadi pada tahun 2024 serta penggunaan teori gerakan sosial baru pada pendekatan Teori Mobilisasi Sumber Daya.

1.5.2. Teori Gerakan Sosial

Gerakan sosial dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu Gerakan Sosial Lama dan Gerakan Sosial Baru. Gardono (dalam Darmawan, 2006) menjelaskan bahwa perbedaan utama antara keduanya terletak pada fokus isu yang diangkat oleh

masing-masing. Gerakan Sosial Lama (Klasik) lebih menekankan pada isu materi dan kelompok, sedangkan Gerakan Sosial Baru berfokus pada ide dan nilai.

Sebagai contoh, gerakan petani dan buruh sering kali dianggap sebagai representasi dari Gerakan Sosial Lama. Gerakan ini berkaitan erat dengan perjuangan kelas yang memiliki basis organisasi pekerja, serta pertentangan ideologi politik yang sering kali muncul dalam gerakan-gerakan tersebut. Gerakan-gerakan semacam ini lebih sering muncul dalam masyarakat industri, di mana kesenjangan antara pemilik modal dan buruh sangat jelas terlihat (Samir Amin, dalam Wagnaraja, 1991: 78).

Di sisi lain, Gerakan Sosial Baru lebih menitikberatkan pada ide dan nilai, dengan contoh gerakan feminisme atau perjuangan hak-hak sipil dan lingkungan. Gerakan ini dianggap lebih efektif dalam masyarakat pasca-industri, yang merespons dampak dari industrialisasi yang terus berlangsung. Isu-isu seperti politik identitas dan kualitas hidup menjadi fokus utama dalam gerakan sosial baru (Barker, 2000: 125). Berdasarkan penjelasan ini, gerakan yang digerakkan oleh JMPPK Rembang lebih cenderung mengarah pada Gerakan Sosial Lama, karena fokus utama pergerakan ini adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat, khususnya terkait dengan sumber daya alam seperti air dan tanah. Dalam gerakan ini, petani juga terlibat untuk mempertahankan sawah mereka sebagai sumber mata pencaharian, melawan perusahaan semen yang berusaha memperluas usahanya.

Teori Gerakan Sosial Baru muncul sebagai kritik terhadap teori Gerakan Sosial Lama, yang cenderung terfokus pada wacana ideologi kelas. Salah satu

perbedaan signifikan antara keduanya adalah bahwa Gerakan Sosial Baru tidak tertarik untuk melakukan revolusi seperti yang dilakukan oleh Gerakan Sosial Lama.

Salah satu gerakan sosial yang berkembang menitikberatkan pada kekuatan sumber daya untuk melakukan mobilisasi aksi dan masa dalam sebuah partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan gerakan sosial. Pendekatan gerakan sosial ini dikenal sebagai Teori Mobilisasi Sumber Daya (*Resource Mobilization Theory/RMT*)

Menurut Oberschall (1973), gerakan sosial tidak hanya dipicu oleh ketidakpuasan kolektif, tetapi juga bergantung pada kemampuan kelompok untuk mengorganisasi sumber daya yang tersedia, seperti kepemimpinan, jaringan sosial, dan dukungan finansial. McCarthy dan Zald (1977) menambahkan bahwa keberhasilan gerakan sosial sangat dipengaruhi oleh akses terhadap sumber daya eksternal, termasuk donasi, bantuan organisasi non-pemerintah, dan dukungan politik. Selain itu, Tilly (1978) berpendapat bahwa mobilisasi sumber daya mencakup strategi kolektif yang digunakan kelompok sosial dalam menghadapi tantangan struktural dan tekanan eksternal.

Lebih lanjut, teori ini juga menyoroti pentingnya jaringan sosial sebagai sarana mobilisasi sumber daya. Morris dan Staggenborg (dalam Sukmana, 2016) menjelaskan bahwa jejaring sosial memungkinkan distribusi sumber daya yang lebih efektif, baik dalam bentuk informasi, dukungan moral, maupun koordinasi aksi kolektif. Snow dan Soule (2010) menekankan bahwa gerakan sosial yang memiliki struktur organisasi yang kuat dan akses terhadap berbagai sumber daya

lebih cenderung bertahan serta mencapai tujuannya. Dengan demikian, *RMT* memberikan perspektif bahwa keberhasilan gerakan sosial tidak hanya bergantung pada kondisi sosial atau politik yang ada, tetapi juga pada kemampuan aktor gerakan dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

Adopsi gerakan sosial dengan basis *RMT* kemudian dijabarkan melalui pendekatan yang dikembangkan oleh Oberschall (1973), indikator tersebut dijelaskan secara mendalam sebagai berikut:

1. Taktik dan pengorganisasian,

Organisasi gerakan sosial merupakan topik yang banyak dibahas dalam studi mengenai gerakan sosial. Oberschall (1973: 102) menjelaskan bahwa teori mobilisasi sumber daya menyoroti konsep mobilisasi sebagai proses pembentukan kelompok, asosiasi, dan organisasi yang bertujuan mencapai kepentingan kolektif. Sementara itu, menurut Sukmana (2016: 161), organisasi gerakan sosial secara umum dapat dipahami sebagai organisasi identitas yang memiliki struktur formal atau kompleks dengan tujuan utama mewujudkan suatu gerakan sosial.

Setiap organisasi gerakan sosial perlu mengelola sumber daya yang tersedia secara optimal. Oberschall (1973: 102) menegaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu gerakan sangat bergantung pada jumlah individu yang bergabung, cara mereka diarahkan, tingkat pengorbanan yang diberikan, serta ketahanan organisasi dalam menghadapi pihak yang berseberangan.

2. Pemimpin dan Kepemimpinan

Berdasarkan pandangan Oberschall (1973: 146-147), pemimpin potensial senantiasa ada dalam masyarakat, namun kemunculannya bergantung pada ketersediaan peluang politik. Oberschall juga menjelaskan bahwa kepemimpinan dapat dipelajari dan dikembangkan melalui pendidikan serta pelatihan berbasis pengalaman, termasuk metode "trial and error" yang terjadi seiring dengan perkembangan suatu gerakan.

Keberadaan pemimpin dan kepemimpinan (*leadership*) merupakan aspek fundamental. Morris dan Staggenborg (dalam Sukmana, 2016: 164) menyatakan bahwa pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam gerakan sosial, yakni menginspirasi komitmen, memobilisasi sumber daya, mengidentifikasi serta memanfaatkan peluang, merancang strategi, merumuskan berbagai tuntutan, dan memengaruhi hasil akhir gerakan. Lebih lanjut, menurut Sukmana (2016: 164), pemimpin gerakan didefinisikan sebagai individu yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan strategis serta memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan mengorganisasi masyarakat agar berpartisipasi dalam gerakan sosial.

3. Sumber Daya dan Mobilisasi Sumber Daya

Menurut Oberschall (1973: 146-148), teori mobilisasi sumber daya dalam gerakan sosial menekankan peran faktor struktural, seperti ketersediaan sumber daya dan posisi individu dalam jaringan sosial. Partisipasi dalam gerakan sosial dipandang sebagai hasil keputusan rasional, bukan sekadar dorongan psikologis. Selain itu, Oberschall menganalisis elemen-elemen penting dalam gerakan sosial serta bagaimana sumber daya dimobilisasi.

Kajian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan, perkembangan, dan perilaku gerakan sosial, terutama kondisi fisik dan lingkungan.

4. Jaringan dan Partisipan

Partisipasi individu dan kelompok merupakan aspek utama dalam gerakan sosial, yang melibatkan upaya kolektif untuk mendorong atau menolak perubahan sosial. Menurut Oberschall (1973: 146-148), teori mobilisasi sumber daya menekankan peran jaringan sosial dan rasionalitas dalam partisipasi gerakan sosial. Esensi teori ini adalah mencari dasar rasional mengenai bentuk dan pola keterlibatan dalam gerakan sosial.

Menurut Sukmana (2016: 174), jaringan sosial adalah struktur sosial yang menghubungkan individu atau organisasi melalui berbagai hubungan, seperti nilai, visi, pertemanan, dan kepentingan bersama. Jaringan ini membentuk keterikatan sosial yang berperan dalam mobilisasi sumber daya dan partisipasi dalam gerakan sosial.

5. Peluang dan Kapasitas

Salah satu faktor utama dalam kemunculan dan kekuatan gerakan sosial adalah kapasitas masyarakat lokal. Menurut Oberschall (1973: 148), perkembangan gerakan sosial dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup kepemimpinan, ketersediaan sumber daya, ukuran kelompok, dan struktur organisasi. Sementara itu, faktor eksternal meliputi tingkat represi sosial, dukungan simpatisan eksternal, serta jumlah dan kekuatan kelompok politik.

Interaksi antara faktor-faktor ini menentukan perkembangan serta dinamika gerakan sosial.

Hunter dan Staggenborg (dalam Sukmana, 2016: 177) menambahkan bahwa sumber daya bagi gerakan sosial sering kali berasal dari luar masyarakat lokal, baik dari sektor swasta, organisasi nirlaba, maupun dana publik yang mendukung berbagai kegiatan dan program khusus.

Secara mendalam, dalam penelitian ini untuk mengukur kedalaman dari keberlangsungan dan keberhasilan gerakan sosial JMPKK Kabupaten Rembang, maka penulis mengadopsi gerakan sosial baru dengan pendekatan Teori Mobilisasi Sumber Daya (Oberschall, 1973). Pendekatan ini dipilih bukan tanpa sebab, mengingat kondisi JMPPK Kabupaten Rembang adalah gerakan sosial yang secara kolektif terus ada hingga saat ini mengelola internalnya untuk melawan ketidakadilan terhadap pembangunan pabrik semen di Tegaldowo, Kabupaten Rembang.

1.6 Definisi Konsep

Definisi konsep dalam penelitian ini diantaranya adalah;

1. Gerakan sosial adalah bentuk aksi atau gerakan yang dibentuk oleh sosial dilakukan oleh individu ataupun kelompok secara terorganisir atau tidak untuk melakukan dorongan, penolakan, atau mengubah keadaan sosial, politik, ekonomi, atau budaya dalam masyarakat. Gerakan sosial terbagi dalam gerakan sosial lama yang mengedepankan kepentingan kelompok/kelas dan partisipan, sedangkan gerakan sosial baru mengedepankan

gerakan sosial dengan nilai-nilai tertentu untuk mengangkat kepentingan sosial.

2. Gerakan sosial baru memiliki keberagaman yang titik beratnya diukur dari keberhasilan gerakan dalam aspek tertentu. Salah satu pendekatannya dikenal dengan Mobilisasi Sumber Daya (*Resource Mobilization Theory/RMT*) yang dikembangkan Oberschall (1973). *RMT* didefinisikan sebagai gerakan sosial tidak hanya dipicu oleh ketidakpuasan kolektif, tetapi juga bergantung pada kemampuan kelompok untuk mengorganisasi sumber daya yang tersedia, seperti kepemimpinan, jaringan sosial, dan dukungan finansial. Dalam pemikiran Oberschall (1973) memiliki indikator seperti; Taktik dan pengorganisasian, Pemimpin dan Kepemimpinan, Sumber Daya dan Mobilisasi Sumber Daya, Jaringan dan Partisipan, serta Peluang dan Kapasitas. Pendekatan ini diadopsi dalam penelitian ini untuk mengukur keberhasilan JMPPK Kabupaten Rembang dalam melakukan gerakan perlawanan terhadap penolakan pembangunan Pabrik Semen di kawasan Tegaldowo.

1.7 Definisi Operasional

Tabel 1.3 Definisi Operasional

No.	Variabel	Dimensi	Ketercapaian
1	<i>Resource Mobilization Theory/RMT</i>	Taktik dan pengorganisasian	1. Terdapat tujuan JMPPK dalam melakukan gerakan perlawanan 2. Terdapat strategi JMPPK dalam melakukan aksi 3. Terdapat latar belakang permasalahan yang mendorong JMPPK dalam

No.	Variabel	Dimensi	Ketercapaian
			melakukan aksi dan gerakan sosial
		Pemimpin dan Kepemimpinan	1. Terdapat organisatoris dalam gerakan oleh JMPPK 2. Terdapat sasaran target dan keanggotaan 3. Adanya motivasi dari pengikut gerakan JMPPK 4. Adanya dorongan dan komitmen dari anggota gerakan
		, Sumber Daya dan Mobilisasi Sumber Daya	1. Terdapat sumber daya manusia yang menjadi bagian JMPPK 2. Terdapat peranan dalam aktivitas gerakan sosial 3. Ketersediaan sumber daya internal untuk melakukan gerakan
		Jaringan dan Partisipan	1. Adanya kesadaran anggota JMPPK terhadap masalah yang sedang dilawan 2. Terdapat pendekatan yang mengikat keanggotaan JMPPK dalam melakukan perlawanan 3. Adanya ketertarikan/tidak ketertarikan khalayak luar JMPPK terhadap gerakan perlawanan.
		Peluang dan Kapasitas	1. Terdapat bentuk/aksi/aktivitas gerakan perlawanan 2. Adanya media sebagai perantara untuk menyampaikan aksi JMPPK 3. Adanya reaksi/timbal balik dari gerakan yang dilakukan oleh JMPPK 4. Adanya konsistensi gerakan oleh JMPPK

Sumber; Oberschall (1973) dengan olah pribadi

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara, langkah, atau prosedur ilmiah untuk memperoleh data guna keperluan penelitian dengan maksud dan tujuan tertentu. Dalam melakukan penelitian, peneliti mengumpulkan informasi dan data, serta memperdalam informasi tersebut untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Metodologi penelitian menguraikan rancangan penelitian untuk mencapai tujuan, dimulai dengan pengambilan data, penyusunan sumber data, dan penulisan laporan.

1.8.1 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, hal ini karena penelitian Kualitatif acap kali dijadikan penelitian yang dilakukan di ranah penelitian Sosial, hal ini dikarenakan menurut Creswell (2007), penggunaan penelitian kualitatif ini adalah untuk Dalam mengeksekusi penelitian kualitatif, wawancara lebih banyak digunakan sebagai metode pengumpulan data utama, karena melalui wawancara peneliti dapat menggali informasi lebih dalam mengenai interpretasi individu yang ditelitinya.

Selain itu pengumpulan data lainnya juga dapat dilakukan melalui pengumpulan kata-kata selain dari individu, misalnya melalui buku dan sumber lain yang menunjang atau mendukung tema penelitian tersebut (Martono, 2015 hal 212). Penelitian mengenai JMPPK ini menggunakan metode kualitatif, karena penelitian ini terkait dengan gerakan yang dilakukan JMPPK melalui teori gerakan sosial baru agar tercapainya tujuan dari gerakan tersebut.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kawasan kendang utara kabupaten Rembang. Peneliti memilih desa Rembang agar kajian penelitian yang dilakukan tidak

melebar dan keluar dari ranah tujuan penelitian yang telah ditentukan. Fokus penelitian ini ialah melihat apa saja upaya gerakan sosial yang dilakukan JMPPK Rembang dalam gerakan menolak pembangunan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng Utara terutama di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan narasumber yang menjadi informan utama dalam penelitian ini. Subjek penelitian juga dapat sebagai sumber utama perolehan data yang berkaitan dengan permasalahan. Subjek penelitian ini di antaranya;

1. Joko Priyanto sebagai Koordinator JMPPK Rembang,
2. Sukinah sebagai warga Tegaldowo dan penggerak JMPPK Rembang, dan
3. Jafar yang merupakan petani di Tegaldowo dan anggota JMPPK Rembang.
4. Gunasih yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Rembang.

1.8.4 Jenis Data

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data diperoleh dari sumber yang berbeda dengan menggunakan teknik pengumpulan data (triangulasi) yang berbeda dan dijalankan secara terus menerus sampai data tersebut jenuh. Pengamatan terus menerus ini menyebabkan fluktuasi data yang besar. Bogdan (Sugiyono, 2019) berpendapat bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan pengambilan dan penyusunan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain untuk memfasilitasi pemahaman dan meningkatkan hasil. untuk yang lainnya. Metode analisis data kualitatif menurut Sugiyono (2019) adalah induktif.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data utama dalam suatu penelitian baik kualitatif ataupun kuantitatif, menurut Sugiyono (2013: 137) Sumber data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dalam artian diperoleh tanpa melalui media perantara informasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder dapat dipahami sebagai data yang tidak diperoleh dari sumber utama, artinya, data sudah tersedia entah melalui media atau apapun sebelum si peneliti tersebut mendapatkannya pertama kali (Martono, 2015). Dasar dari penggolongan data sekunder ialah, data tersebut telah diolah, dikemas dan disusun menjadi sebuah artikel. Data sekunder dapat diperoleh melalui jurnal-jurnal penelitian maupun media massa baik cetak maupun media daring (dalam jaringan), yang tidak lupa dari suatu lembaga tertentu yang membidangi subjek yang akan diteliti, Yang kemudian data tersebut harus dinilai lagi berdasarkan kualitas informasi baik artikel maupun opini yang disampaikan (Martono, 2015).

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data:

1. Observasi

Observasi partisipasi adalah proses mendapatkan data atau informasi menggunakan pancaindra. Proses ini menuntut peneliti untuk terlibat

dalam situasi sosial yang diamati dan mencatat apa-apa yang sedang terjadi, hal inilah yang membuat peneliti sebagai instrument penelitian utama dengan catatan peka indra penglihatan, rasa dan sebagainya (Jones dan Somekh, 2005 : Sanger 1996). Dalam penelitian mengenai JMPPK ini bila merujuk pada Martono (2015), pengamatan yang dilakukan dilakukan dalam metode pengamatan tidak berpartisipasi, menurut Gomm (2009) dan Sanger (1996), pengamatan jenis ini dilakukan agar tidak mempengaruhi keaslian atau kealamian data dari objek yang diteliti, maka sang peneliti pun secara sembunyi-sembunyi melakukannya.

2. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara dimasukkan didalam metode pengumpulan data. Wawancara sendiri dalam Martono (2015) diartikan sebagai metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada seseorang yang merupakan responden atau informan sang peneliti. Adapun wawancara sebaiknya dilakukan secara langsung, namun apabila wawancara tidak dapat dilakukan secara langsung, dapat juga dilakukan secara tidak langsung baik melalui Telepon, bertukar pesan singkat, ataupun telepon video. Sesuai dengan yang telah dijabarkan, kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti sendiri dilakukan secara langsung dengan membawakan suasana semi formal agar memberikan suasana nyaman baik pada informan maupun peneliti sendiri. Berikut narasumber yang bisa diwawancarai di antaranya Joko Priyanto selaku Koordinator JMPPK Rembang, Bapak Supari selaku Sekretaris JMPPK,

Sukinah selaku penggerak JMPPK Rembang, dan Jafar selaku petani dan anggota JMPPK Rembang.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (2014) adalah model analisis data interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lanjut yaitu:

1. Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data terdapat beberapa data untuk dianalisis yang melibatkan transkrip wawancara, hasil data lapangan, memilah berbagai data yang berbeda dan disusun berdasarkan sumber informasi.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulannya dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan analisis kualitatif yang meliputi berbagai jenis matriks, grafis, dan bagan. Pada penelitian kualitatif digunakan penyajian data dalam bentuk uraian singkat dan tabel. Dengan hal itu, penyajian data maka dapat terorganisasikan dan semakin mudah untuk dimengerti.

4. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh (Miles dan Huberman, 2014). Kesimpulan di dalam penelitian kualitatif akan terus berkembang sejalan dengan penemuan data baru dan

pemahaman baru, sehingga akan menghasilkan data yang lengkap yang akan dirumuskan pada kesimpulan akhir.

Untuk menguji keabsahan data, dilakukan cara dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Sugiyono (2012:327) merupakan teknik pengumpulan data-data dan sumber yang telah ada. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi, membandingkan perkataan orang dengan pengamatan ataupun dokumen dan membandingkan berdasarkan perspektif orang.